

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ade Parlaungan Nasution

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu

Email: adenasution@gmail.com

corresponding mail author : adenasution@gmail.com

***Abstract** : The implementation of regional development requires accurate planning so that it is hoped that regional governments can evaluate the development strategies they are doing. In line with the rapid pace of development in the regions, data and development indicators are needed in accordance with predetermined development plans and strategies. Natural resources are important assets in driving the wheels of development in an area. The aspect of utilizing natural resources is a very strategic matter in determining the amount of revenue or the level of its contribution in the formation of regional development capital. Management of natural resources in the perspective of Regional Autonomy is basically the power sharing of the authority for managing natural resources between the Government and Provinces and Regencies / Cities. In addition, the quality of human resources is an important component in every move of a regional development strategy. High-quality human resources can accelerate regional development. In order to become a formidable human resource, the population must have sufficient quality so that it can become an effective development capital. Without an increase in quality, the large population will cause various problems and become a burden for development. Development efforts through a planned regional development strategy can produce the expected achievement of development goals. Appropriate planning in accordance with the conditions in an area is an absolute requirement for regional development efforts. In addition, collaboration with the principle of partnership between government and society is an important aspect that needs to be considered in implementing development strategies area.*

***Keyword** : Development Strategy, Improving Quality, Natural Resources, Human Resources.*

I. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah telah merubah karakteristik dari pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralisasi (terpusat), sekarang mengarah kepada desentralisasi dengan mengedepankan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya. Pembangunan ekonomi daerah dimaknai sebagai suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2000). Konseptual pembangunan daerah cenderung dimaknai secara pragmatis di mana proses pembangunan daerah di anggap mampu secara efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan secara otonomi diyakini mampu merespons permasalahan aktual dan factual yang sering muncul dalam keadaan masih tingginya intensitas alokasi sumber daya alam dalam pembangunan. Otonomi dalam administrasi pembangunan ini dirasakan makin relevan sejalan dengan keragaman sosial dan ekologi (bio-social diversity) pada suatu wilayah. Setiap daerah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda

dengan daerah lain. Hal ini menyebabkan tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku dan disamakan untuk semua daerah. Dalam proses menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, diperlukan pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah berdasarkan pada kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah. Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program, dan sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di salam mewujudkan visi dan misi. Kemudian strategi ini oleh SKPD merupakan cara untuk mencapai tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Fokus pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan (sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan modal) berbasis pada pedesaan. Mengembangkan agribisnis dan ekonomi pedesaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Membangun manusia yang cerdas, religius, berbudaya dan memiliki keterampilan. Pembangunan daerah pada umumnya berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau keputusan politik dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, kesepakatan-kesepakatan nasional menyangkut sistem politik dan pemerintahan, atau aturan mendasar lainnya, sangat menentukan pengertian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, serta diperlukan berbagai kajian untuk mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (resources), baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas. Kuantitas dari sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan ketersediaan dari sumber daya tersebut. Kuantitas sumber daya tanpa disertai dengan kualitas yang akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas Sumber merupakan mutu dari sumberdaya yang tersebut baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

II. MATERIALS AND METHOD

a. Strategi Pembangunan Daerah

Secara umum strategi pembangunan daerah adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Lincoln Arsyad (2010) memberikan pengertian pembangunan ekonomi daerah adalah “sebagai proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut”. Pokok permasalahan dalam pembangunan daerah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari setiap strategi pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumberdaya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya- sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya.

b. Strategi pembangunan daerah untuk meningkatkan mutu sumber daya alam

Salah satu strategi pembangunan daerah ialah pemanfaatan dan peningkatan mutu Sumber Daya Alam (SDA) secara luas. Pengelolaan sumber daya alam tersebut tersebar di beberapa sektor yaitu Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan. Peningkatan mutu pengelolaan sumber daya alam ini hendaknya dilakukan dengan cara yang bijaksana sehingga pemanfaatannya tidak hanya akan dirasakan

oleh masyarakat pada saat sekarang namun juga bagi generasi di masa mendatang. Strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk peningkatan sumber daya alam yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan optimalisasi pengembangan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengutamakan kelangsungan lingkungan hidup.
2. Melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
3. Mengembangkan konsep agribisnis dengan memperhatikan pada satu produk unggulan untuk satu wilayah seperti perkebunan sawit.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan sumber daya alam.
5. Menyediakan fasilitas permodalan bagi petani dan nelayan dalam mengembangkan usahanya.
6. Memfasilitasi upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
7. Memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam.
8. Meningkatkan ketersediaan sumber daya energi kelistrikan bagi masyarakat hingga ke wilayah pesisir dan pedesaan.
9. Mengoptimalkan upaya inventarisasi sumber daya energi alternatif dan sumber daya mineral yang ada di provinsi Sumatera Utara.
10. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan lembaga penelitian seperti universitas dalam upaya pengembangan pertambangan yang ramah lingkungan.
11. Memfasilitasi pengembangan penelitian pencarian sumber daya energi alternatif yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas.
12. Meningkatkan ketersediaan informasi geologi, sumber daya mineral, listrik dan energi yang dapat diperbaharui.

c. Strategi pembangunan daerah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia

Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terarah dan terencana disertai dengan pengelolaan yang baik dapat menghemat sumber daya alam, karena pengolahan dan pemakaian sumber daya alam dapat dilakukan dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna. Pada masa otonomi daerah dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat yang sudah diberikan kepada daerah menuntut masing-masing daerah berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat daerah. Begitu juga dalam hal peningkatan daya saing daerah, membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah sehingga apa yang dimiliki daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah. Strategi pembangunan daerah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia meliputi bidang pendidikan, dan kesehatan yaitu melalui peningkatan dan pengembangan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan formal dan non formal serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang bermutu, mudah, murah, cepat dan tepat. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut.

d. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, strategi yang dapat dilaksanakan yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal. Peningkatan kualitas pendidikan formal hendaknya dimulai pada level Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah menengah Atas (SMA/SMK/MA) hingga level perguruan tinggi. Sedangkan untuk pendidikan non formal dilaksanakan meliputi pendidikan luar sekolah (kursus/diklat, dan pendidikan sejenis) dan pendidikan keaksaraan fungsional. Adapun strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah dapat mengupayakan terealisasinya pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 %

dari APBD

2. Melakukan pemerataan dan penyediaan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang cacat.
3. Menyediakan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar Mengajar yang memadai dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
4. Menyediakan sarana untuk penyelenggaraan kegiatan belajar masyarakat dan pelatihan/pendidikan non formal bagi warga masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan/ketrampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidup.
5. Melakukan kegiatan pengembangan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan serta kesiapan peserta didik dalam memasuki dunia kerja melalui kerja sama antara dunia usaha dengan dunia pendidikan.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka membina potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
7. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas.
8. Menyediakan sarana pelatihan dengan system customized training, yaitu system pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja.
9. Menyediakan fasilitas bank keahlian (skill banks), sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah
10. Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.
11. Menurunkan jumlah penyandang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional.
12. Mengembangkan Kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan daerah serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni untuk meningkatkan etos kerja, kemampuan kewirausahaan kepribadian peserta didik yang mantap dan keberlanjutan lingkungan hidup.

e. Bidang Kesehatan

1. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan memfasilitasi peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang profesional, peningkatan jumlah dan mutu sarana prasarana kesehatan serta obat dan perbekalan kesehatan.
2. Melakukan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan pemberian jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu dan peningkatan jenis pelayanan sampai dengan pengobatan paripurna.
3. Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas Surveillance Epidemiologi untuk penyakit menular dan tidak menular.
4. Melakukan peningkatan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan bersumber masyarakat dan upaya pembinaan kelangsungannya.
5. Melakukan peningkatan kerjasama lintas sektoral dan lintas program dalam mewujudkan lingkungan sehat.

III. CONCLUSION

Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan perencanaan yang akurat sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap strategi pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan di daerah, maka diperlukan data dan indikator-indikator pembangunan yang sesuai dengan perencanaan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan.

Sumberdaya alam merupakan modal penting dalam menggerakkan roda pembangunan di suatu

daerah. Aspek pemanfaatan sumberdaya alam merupakan suatu yang sangat strategis dalam menentukan jumlah penerimaan atau tingkat kontribusinya dalam pembentukan modal pembangunan daerah. Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif Otonomi Daerah pada dasarnya adalah power sharing kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara Pemerintah dengan Propinsi dan kabupaten/kota.

Formulasi berbagai problem dasar tersebut memerlukan berbagai pemikiran dan diskusi untuk mencari pemecahannya. Kerja keras yang sistematis dan terus menerus sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan strategi pembangunan daerah. Partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat untuk menggalang sumberdaya sangat diperlukan.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak dari strategi pembangunan daerah. Dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat mempercepat pembangunan daerah. Agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh penduduk harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat menjadi modal pembangunan yang efektif. Tanpa adanya peningkatan kualitas, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai masalah dan menjadi beban pembangunan.

Upaya pembangunan melalui strategi pembangunan daerah yang terencana dapat menghasilkan capaian tujuan pembangunan yang diharapkan. Perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

IV. REFERENCES

- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Owen, O.S. 1980. *Natural Resource Conservation: An Ecological Approach*. Third Edition. Macmillan Publishing Co., Inc. 866. Third Avenue, New York, New York 10022 883 hal.
- Rahayu, Sri Endang. 2011. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara". *Jurnal Manajemen & Bisnis*. Vol II, Nomor 02.
- Riyadi, D.M.M. 2000. *Implementasi Otonomi Daerah: Perspektif Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pengembangan Wilayah*. Makalah disampaikan pada Semiloka Nasional Pembangunan Wilayah dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Wacana Federasi. Program Pascasarjana IPB di Badan Pusat Statistik – Jakarta, 8-9 November 2000.
- Safina, Lailan dan Rahayu, Sri Endang. 2011. "Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara". *Jurnal Manajemen & Bisnis*. Volume II, Nomor 01.
- Sulistiawati, Rini. 2012 *Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan masyarakat di Provinsi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*: vol 3, no 1 2012
- Suparmoko, M. 1995. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*. Edisi 2. BPFE-Yogyakarta.
- Syafitri, Irma. 2009. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara". Universitas Sumatera Utara